

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memiliki peran penting dalam mengelola dan mengontrol pemberitaan media terkait isu polusi udara. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelestarian lingkungan, Kementerian LHK dihadapkan pada tantangan besar dalam memastikan informasi yang disampaikan kepada publik akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengacu pada Perpres No. 16 Tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang memiliki tanggung jawab terhadap urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Lembaga ini berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Biro Humas Kementerian LHK perlu memahami bagaimana isu lingkungan hidup dan kehutanan disajikan di media massa dan merumuskan strategi komunikasi yang efektif. Aktivitas *media monitoring* diperlukan untuk mengontrol opini publik terhadap penyebaran informasi mengenai isu lingkungan hidup dan kehutanan.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan internet, volume dan keragaman media massa meningkat pesat (Mudjiyanto & Dunan, 2020). Biro Humas menghadapi tantangan dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber media, serta mengukur perhatian publik terhadap isu-isu tersebut. Kecepatan penyebaran berita di era digital menuntut Biro Humas untuk merespons isu-isu sensitif dengan cepat dan akurat. Biro ini juga perlu menghadapi kemungkinan berkembangnya isu menjadi krisis yang dapat mempengaruhi opini publik. Oleh karena itu, strategi efektif diperlukan dalam menghadapi krisis dan menjaga transparansi komunikasi. Selain itu, *media monitoring* tidak hanya mencakup pengumpulan informasi, tetapi juga melibatkan analisis sentimen publik terhadap isu-isu tertentu. Biro Humas perlu memahami pandangan masyarakat terkait kebijakan atau tindakan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi mereka.

Pada konteks lembaga pemerintahan, Humas dianggap sebagai keharusan fungsionaris untuk menjalankan tugas penyebarluasan informasi dan kebijakan kepada masyarakat. Biro Hubungan Masyarakat perlu membangun mekanisme umpan balik yang sistematis agar dapat mendukung pencapaian target-target kinerja program Kementerian LHK. Salah satu peran Biro Hubungan Masyarakat adalah melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap berita yang terkait dengan isu lingkungan hidup dan kehutanan. *Media monitoring* yang dilakukan oleh Biro Humas Kementerian LHK bertujuan untuk memantau dan mengawasi pemberitaan serta konten yang berkaitan dengan Kementerian tersebut di berbagai media, termasuk media massa. Hal ini dilakukan untuk memahami sejauh mana citra Kementerian LHK dipengaruhi oleh berita dan informasi yang tersebar di publik. Biro Humas Kementerian LHK memiliki satu bagian sendiri yang bertanggung jawab atas hal ini, yaitu Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik.

Pemahaman terkait bagaimana informasi tersebar dan diterima oleh masyarakat melalui aktivitas *media monitoring* menjadi suatu hal yang krusial, terutama bagi lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat dan seimbang kepada publik. Menurut Clayton dan Petry dalam (Amrullah, 2022) *media monitoring* adalah praktik pengawasan terhadap berbagai media untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam pengambilan keputusan manajemen program atau proyek. Data ini kemudian diolah, dicatat, dikumpulkan, dan dikomunikasikan. Bagi lembaga pemerintahan, seperti Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), *media monitoring* memiliki peran sentral dalam menjalankan tugas-tugas strategis. Kementerian LHK memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan dan memastikan kesadaran masyarakat terkait isu-isu lingkungan hidup dan kehutanan. Kontrol terhadap pemberitaan isu tersebut menjadi suatu hal yang penting agar pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan kebijakan pencegahan dan pengendalian.

Media monitoring membuka pintu luas bagi lembaga pemerintahan untuk memantau, menganalisis, dan mengevaluasi penyebaran informasi terkait kebijakan, program, dan inisiatif mereka (Amalia, 2018). Ini membantu dalam menilai efektivitas komunikasi, merumuskan strategi komunikasi yang lebih baik, dan merespons dengan cepat terhadap isu-isu mendesak yang berkembang di masyarakat.

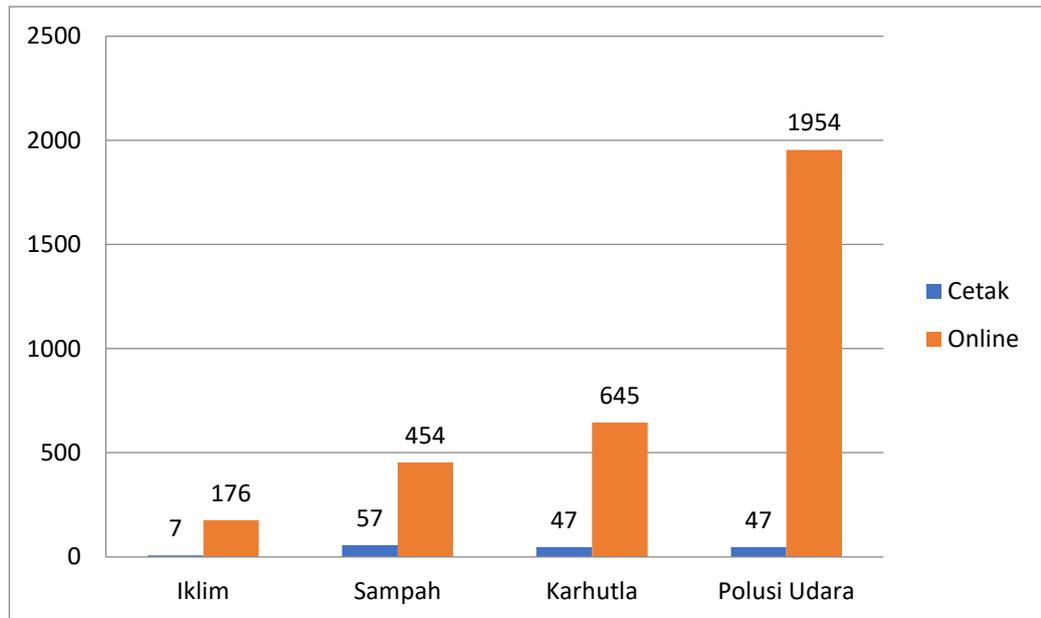
Selain itu, *media monitoring* memungkinkan identifikasi lebih baik terhadap persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, memfasilitasi transparansi, dan mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan strategis. Dengan adanya aktivitas *media monitoring* ini, dapat menjadi wadah bagi humas sebagai badan publik untuk membangun citra positif lembaga pemerintahan.

Peran humas berkaitan erat dengan analisis pemberitaan media yang mencakup berita positif, negatif, maupun netral, dimana semuanya memiliki potensi untuk memberikan pengaruh terhadap citra dan reputasi institusi tersebut. Para profesional humas sering kali terlibat dalam aktivitas *media monitoring* sebagai bagian dari evaluasi mereka terhadap hubungan media. Ketika pers memberitakan suatu permasalahan dengan cara yang faktual dan benar, dapat dikatakan bahwa upaya humas membuahkan hasil (Gunawan & Anisa, 2020). Tujuan utama dari *media monitoring* ini adalah untuk mengurai dan menganalisis pemberitaan yang disajikan oleh media massa. Praktik *media monitoring* juga memberikan manfaat signifikan dalam konteks pengambilan kebijakan serta menjadikannya sebagai unsur penting dalam pekerjaan seorang praktisi kehumasan, salah satunya bagi humas pemerintah.

Menjalin hubungan baik dengan media menjadi suatu hal penting bagi sebuah lembaga pemerintahan (Prastowo, 2020). Hal ini diperlukan guna menjembatani komunikasi yang efektif dalam penyampaian pesan dan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk kemudian dipublikasikan melalui media massa. Seorang humas pemerintah harus mampu membangun relasi yang harmonis dengan media, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima oleh publik. Penggunaan media massa secara strategis oleh seorang humas dapat membentuk opini publik sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi masyarakat, kelompok, dunia usaha, dan negara (Nurdiansyah & Kartika dalam Gunawan & Anisa, 2020). Efektivitas upaya ini dapat dievaluasi dengan mengawasi berita melalui aktivitas *media monitoring*.

Salah satu isu bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendapat perhatian publik di pertengahan tahun 2023 ialah polusi udara. Hal ini dibuktikan oleh hasil *media monitoring* Kementerian LHK yang menyatakan bahwa polusi udara merupakan isu yang paling banyak disorot media pada periode Agustus hingga September. Jika dibandingkan dengan tiga isu lainnya, yakni isu iklim, sampah, dan kebakaran hutan & lahan (karhutla), polusi udara menjadi isu yang paling banyak

diberitakan di media massa. Hal ini dapat dilihat melalui hasil *monitoring* Biro Humas Kementerian LHK periode Agustus 2023 hingga September 2023 yang kemudian diolah dan direkap oleh peneliti menjadi sebuah diagram batang sebagai berikut:



Gambar 1.1 Perbandingan Pemberitaan Isu Lingkungan Hidup dan Kesehatan di Media Cetak dan Online pada Periode Agustus - September
Sumber: Olahan Peneliti (2023)

Pemberitaan yang paling banyak disorot terkait isu ini ialah kondisi polusi udara yang sangat mengkhawatirkan di Jakarta pada rentang waktu Agustus-September 2023 serta sumber dari polusi tersebut. Selain itu, banyak pemberitaan tentang langkah-langkah yang dijalankan pemerintah untuk meredakan permasalahan polusi udara. Dampak dari polusi udara juga tidak sedikit ditemui di berbagai media, baik itu cetak maupun *online*. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada aktivitas *media monitoring* Biro Humas Kementerian LHK pada periode Agustus hingga September 2023 secara spesifik pada isu polusi udara.

Kesehatan manusia sangat dipengaruhi oleh polusi udara, baik secara langsung maupun dalam waktu lama. Paparan udara yang tercemar dapat memperburuk serangan asma, menyebabkan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan bagian bawah, dan bahkan menyebabkan kanker paru-paru. Selain memengaruhi saluran napas, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa polusi udara juga menjadi penyebab

penyakit seperti diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular, obesitas, inflamasi sistemik, alzheimer, dan demensia. Dampak serius lainnya termasuk kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Uni Eropa mencatat terdapat 238.000 kematian prematur akibat polusi udara selama tahun 2020 (Media Indonesia, 2023).

Dengan masifnya pemberitaan lewat media massa terkait isu polusi udara menjadikan isu ini unik dari sisi urgensinya karena dampak yang dihasilkan dapat mempengaruhi kesehatan manusia, keberlanjutan lingkungan, dan stabilitas ekosistem global. Peneliti tertarik menggunakan studi kasus untuk menyelidiki hal ini lebih jauh. Studi kasus adalah penyelidikan empiris terhadap suatu fenomena modern dalam situasi aktual (Yin dalam Nur'aini, 2020).

Masalah pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara atau polusi udara telah mendapat perhatian sejak lama dan menjadi isu penting hingga saat ini (Hasanuddin & Herdianto, 2023). Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan populasi dan industrialisasi yang pesat. Pertumbuhan penduduk yang diikuti perkembangan industri dan transportasi selain berdampak positif pada perekonomian, juga memberi dampak negatif dengan meningkatnya polusi udara (Abidin & Hasibuan, 2019). Sebanyak 90% dari pencemaran udara disebabkan oleh aktivitas manusia, sementara 10% sisanya disebabkan oleh aktivitas alam (Sudaryanto., dkk, 2022). Penyebab utama permasalahan ini ialah meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil dalam sektor transportasi dan industri.

Menurut data dari IQAir, perusahaan teknologi asal Swiss yang melacak kualitas udara di seluruh dunia, Jakarta, Indonesia tercatat menjadi kota dengan polusi udara atau kualitas udara terburuk ke-9 di dunia per 29 Oktober 2023. Indeks kualitas udara (Air Quality Index/AQI) Jakarta, Indonesia telah mencapai angka 152 yang dimana angka tersebut termasuk dalam kategori tidak sehat. Sebagai informasi, pengukuran indeks kualitas udara (AQI) dibagi menjadi enam kategori dengan nilai yang berbeda. Semakin tinggi nilai AQI mencerminkan tingkat polusi udara yang lebih tinggi di daerah tersebut.

0-50	51-100	101-150	151-200	201-300	301+
Baik	Sedang	Tidak sehat bagi kelompok rentan	Tidak sehat	Sangat tidak sehat	Berbahaya
Rangking	Kota besar, negara/wilayah	AQI US	Pengikut		
1	Lahore, Pakistan	268	319.9K pengikut		
2	Beijing, Cina	209	4.8M pengikut		
3	Delhi, India	190	2.7M pengikut		
4	Wuhan, Cina	182	242.9K pengikut		
5	Ulaanbaatar, Mongolia	180	41K pengikut		
6	Krasnoyarsk, Rusia	178	85.6K pengikut		
7	Dhaka, Banglades	166	204.9K pengikut		
8	Shenyang, Cina	155	123K pengikut		
9	Jakarta, Indonesia	152	1.6M pengikut		

Gambar 1.2 Ranking Indeks Kualitas Udara Dunia
 Sumber: <https://www.iqair.com/id/world-air-quality-ranking>

Hasil pemantauan kualitas udara dari stasiun pemantauan otomatis berkelanjutan dilaporkan dalam bentuk Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bagian dari upaya pengendalian pencemaran udara. Kondisi kualitas udara di suatu wilayah dapat digambarkan dengan menggunakan ISPU, suatu angka tanpa satuan yang memperhitungkan dampaknya terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan bentuk kehidupan lainnya (DITJEN PPKL Kementerian LHK, 2020). Berikut peta sebaran ISPU di Indonesia berdasarkan pemantauan Kementerian LHK per 29 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB.



Gambar 1.3 Peta Sebaran ISPU di Indonesia
 Sumber: <https://ispu.menlhk.go.id/webv4/#/>

Sebagai upaya mengurangi polusi udara, Kementerian LHK aktif menggalakkan pemeriksaan emisi kendaraan bermotor di wilayah Jabodetabek (Medcom.id, 2023). Pemeriksaan emisi ini disediakan secara gratis oleh Kementerian LHK untuk digunakan oleh masyarakat luas. Berdasarkan informasi dari Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian LHK, data pemeriksaan emisi kendaraan bermotor dapat diakses melalui aplikasi Si-Umi (Sistem Informasi Uji Emisi) atau DKI e-ujiemisi. Kementerian LHK juga berusaha mengurangi polusi udara dengan menghentikan kegiatan operasional berbagai perusahaan yang melanggar aturan terkait pencemaran udara (Jawa Pos, 2023). Selain itu, kementerian ini mengimplementasikan langkah-langkah lain, termasuk menerjunkan satuan tugas pengendalian pencemaran udara untuk mengawasi dan menindak pelanggar, operasi inspeksi lapangan, serta mengadakan kampanye publik mengenai teknik mengemudi yang aman, nyaman, efisien, dan ramah lingkungan (*eco-driving*) (Kementerian LHK, 2023).

Dalam hal ini, media massa memiliki peran penting untuk menyebarkan informasi terkait isu-isu lingkungan, termasuk polusi udara. McCombs & Shaw dalam (Putra & Hirzi, 2022) menyatakan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk memengaruhi serta membentuk pola pikir audiens yang mengonsumsi informasinya. Media massa berperan penting dalam perubahan sikap, pola pikir, dan bahkan pembentukan opini para pembaca. Analisis pemberitaan media massa atau yang umumnya disebut sebagai *media monitoring*, menjadi sebuah aspek penting dalam rangka mengetahui bagaimana suatu institusi diposisikan dan direpresentasikan oleh media massa (Gunawan & Anisa, 2020).

Mengingat kompleksitas dan urgensi isu polusi udara, penelitian ini berfokus pada analisis strategi *media monitoring* yang digunakan oleh Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengontrol pemberitaan mengenai isu polusi udara di media massa. Pemahaman mendalam tentang strategi ini menjadi krusial untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik sesuai dengan tujuan pencegahan dan penanganan polusi udara. Penelitian mengenai *media monitoring* sendiri sudah cukup banyak dibahas, salah satunya yakni penelitian yang dilakukan oleh Aditya Ilham Gunawan dan Renata Anisa dengan judul “Kegiatan *Media Monitoring* Humas Pemerintah Kota Cimahi”. Akan tetapi masih sedikit penelitian yang membahas strategi *media monitoring* humas

pemerintah di lembaga kementerian dalam mengontrol pemberitaan sebuah isu spesifik yang tergolong krusial dan banyak dibicarakan.

Upaya *media monitoring* Humas Pemerintah Kota Cimahi dijelaskan oleh Aditya dan Renata dalam studinya. Penelitian tersebut hanya membahas secara spesifik bagaimana Humas Pemkot Cimahi mengawasi pemberitaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 ini, terdapat tiga fase berbeda dalam tindakan *media monitoring* yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi. Pada awalnya, mereka merencanakan media mana yang akan menjadi target dan sumber utama kliping harian mereka. Langkah selanjutnya adalah membaca dan memotong berita dari berbagai sumber cetak dan internet yang relevan dengan kondisi saat ini. Tahap terakhir yakni evaluasi, tim Humas melakukan evaluasi terhadap pemberitaan yang berkaitan dengan Pemerintah Kota Cimahi guna memahami bagaimana pemberitaan tersebut diterima oleh masyarakat dan juga untuk merencanakan tindakan yang akan diambil dalam menanggapi berita tersebut.

Penelitian lainnya yang menjadi acuan peneliti ialah tulisan oleh Boyang Zhang & Marita Vos dengan judul “*Social Media Monitoring: Aims, Methods, and Challenges for International Companies*”. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 ini membahas bagaimana tujuan, metode, dan tantangan *social media monitoring* dari perspektif perusahaan internasional. Metode yang digunakan ialah studi literatur sistematis dengan meninjau 30 artikel penting dari tahun 2008 hingga 2012 untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan internasional memerlukan perangkat lunak *real-time monitoring*, keahlian, dan visualisasi dinamis untuk memprediksi serta melakukan deteksi dini terkait perbincangan publik di media guna mendukung pembuatan strategi berikutnya.

Subjek penelitian tersebut bersifat general yaitu perusahaan internasional, sementara peneliti mengambil subjek pada salah satu lembaga pemerintah yang ada di Indonesia, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lebih khusus lagi pada Bagian Biro Humas. Objek dari kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang *monitoring*, hanya saja peneliti berfokus pada *monitoring* media massa, sementara penelitian yang dilakukan oleh Boyang Zhang & Marita Vos berfokus pada *social media monitoring*.

Penelitian mendalam terkait strategi *media monitoring* yang digunakan oleh Biro Humas Kementerian LHK guna mengontrol pemberitaan isu lingkungan hidup dan kehutanan, terutama polusi udara, menjadi sangat relevan dan penting. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi strategi *media monitoring* yang efektif dalam mengelola pemberitaan mengenai polusi udara di media massa. Temuan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perumusan kebijakan serta meningkatkan kesadaran publik terhadap isu lingkungan hidup dan kehutanan untuk mencapai lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Peneliti lebih memfokuskan pada strategi *media monitoring* karena melihat pentingnya hal ini untuk mengetahui apa saja yang dibicarakan oleh media terkait isu polusi udara sehingga bisa dijadikan rujukan bagi pimpinan guna menentukan strategi komunikasi dan kebijakan lebih lanjut. Berdasarkan pra-riset yang dilakukan oleh peneliti, Biro Humas Kementerian LHK tidak hanya mencari dan mengumpulkan berita tetapi juga menggunakan hasil *monitoringnya* sebagai bahan evaluasi untuk menentukan strategi kedepannya. Hal tersebut terimplementasikan dari data laporan *media monitoring* Kementerian LHK yang mencantumkan ringkasan dan catatan sebagai gambaran bagaimana isu lingkungan hidup dan kehutanan diberitakan di media massa. Dalam hal ini, Biro Humas Kementerian LHK juga melakukan *media relations* untuk mempererat hubungan dengan media. Hanya saja, pada penelitian ini peneliti lebih berfokus pada kajian strategi *media monitoring* yang digunakan oleh Biro Humas Kementerian LHK dalam mengontrol pemberitaan isu polusi udara.

Sebagai rujukan untuk menguraikan masalah penelitian, peneliti mengacu pada teori proses perencanaan strategi humas oleh Cutlip, Center, dan Broom (2009) yang dapat diterapkan pada aktivitas *media monitoring* oleh Biro Humas Kementerian LHK. Menurut Cutlip, Center, dan Broom (2009), terdapat empat tahapan dalam proses perencanaan strategi humas, diantaranya adalah *defining public relations problems* (mendefinisikan masalah hubungan masyarakat), *planning and programming* (membuat rencana dan program), *taking action and communicating* (mengambil tindakan dan berkomunikasi), dan *evaluating the programs* (mengevaluasi program).

Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui bagaimana Biro Humas Kementerian LHK mengontrol

pemberitaan mengenai isu polusi udara dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan lainnya, penelitian ini menganalisis dokumen, melakukan wawancara mendalam, dan mengamati peristiwa (observasi) untuk menyusun datanya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini diberi judul “Strategi *Media Monitoring* Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Mengontrol Pemberitaan Isu Polusi Udara”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi *media monitoring* Biro Humas Kementerian LHK dalam mengontrol pemberitaan isu polusi udara?

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti berangkat untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui strategi *media monitoring* Biro Humas Kementerian LHK dalam mengontrol pemberitaan isu polusi udara.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat baik teoritis maupun praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya bahan kajian analisis serta informasi khususnya di bidang kehumasan. Disamping itu juga menjadi referensi dan pelengkap literatur mengenai kegiatan *monitoring* di media massa oleh instansi pemerintahan, terutama terkait dengan pengelolaan isu polusi udara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai bahan rekomendasi kepada Biro Humas Kementerian LHK dalam mengembangkan strategi

media monitoring yang paling tepat dan efektif. Selain itu juga untuk menunjukkan urgensi *media monitoring* dalam mengontrol pemberitaan suatu isu sehingga dapat membantu instansi lain dalam mengembangkan strategi *media monitoring*-nya masing-masing.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menetapkan lokasi penelitian pada Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2023 sampai dengan Mei 2024. Berikut ini diuraikan agenda penyusunan skripsi.

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan										
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
1	Penentuan topik dan metode penelitian	■										
2	Penyusunan BAB I		■									
3	Penyusunan BAB II			■								
4	Penyusunan BAB III			■								
5	Desk Evaluation				■							
6	Pengumpulan dan Pengolahan Data				■	■	■	■				
7	Penyusunan BAB IV							■	■			
8	Penyusunan BAB V									■		
9	Sidang Skripsi											■

Sumber: Olahan Peneliti (2023)